



Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Agraria di Wilayah Pedesaan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Angel Nur Yasmin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur angelnuryasmin131@gmail.com	ISSN: 3046-8507 Vol. 1, No. 2, Juli 2024 http://almufi.com/index.php/ASH
Virly Agustin Aldilla Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur virlyagustinaldilla@gmail.com	
Putri Bintang Riani Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur puputbin@gmail.com	
Muhammad Kevin Mulyawarman Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur kevin.dlcno13@gmail.com	
Syahira Alfiani Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur syahiraalfiani@gmail.com	
Asnawi Mubarak Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur am764@umkt.ac.id	

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Yasmin, A. N., Aldilla, V. A., Riani., Mulyawarman., Alfiani., & Mubarak, A. (2024) Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Agraria di Wilayah Pedesaan. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 60-68.

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah agraria di wilayah pedesaan Indonesia, yang menjadi isu krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keadilan sosial. Melalui analisis kebijakan agraria, studi kasus dari beberapa daerah pedesaan, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah sangat vital dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan implementatif, namun dihadapkan pada berbagai hambatan seperti birokrasi yang kompleks, korupsi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Artikel ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai solusi agraria yang berkelanjutan dan adil.

Kata Kunci: hukum agraria, peran pemerintah, masalah tanah

Abstract

This article explores the role of the government in addressing agrarian issues in rural Indonesia, which is a crucial issue in improving community welfare and ensuring social justice. Through policy analysis, case studies from several rural areas, this study identifies the challenges and solutions faced in efforts to resolve land disputes. The research finds that the government's role is vital in creating effective and implementable policies, but it is confronted with various obstacles such as complex bureaucracy, corruption, and lack of coordination among institutions. Moreover, community participation in the land dispute resolution process shows a significant impact on the effectiveness of the policies implemented. This article suggests the need for enhanced cross-sector coordination and community empowerment to achieve sustainable and equitable agrarian solutions.

Key Words: agrarian law, government role, land issues

A. Pendahuluan

Masalah agraria di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Di wilayah pedesaan, tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi. Konflik agraria seringkali timbul akibat ketidaksesuaian antara kepemilikan dan penggunaan lahan, yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang kurang memadai serta adanya klaim tumpang tindih dari berbagai pihak. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh sengketa tanah ini berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan, menghambat pembangunan berkelanjutan, dan sering kali menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat yang bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan mereka. (Amaliyah dkk., 2021)

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah agraria melalui berbagai kebijakan dan program, seperti Reforma Agraria, sertifikasi tanah, dan pembaruan hukum agraria. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, termasuk birokrasi yang rumit dan tidak efisien, praktik korupsi yang merajalela, serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusional juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan agraria. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah seringkali masih minim, sehingga solusi yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut. (Aswim dkk., 2022)

Penyelesaian sengketa agraria yang efektif sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Keberhasilan penyelesaian sengketa agraria tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam peran pemerintah dalam mengatasi masalah agraria dan bagaimana tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dinamika tersebut dengan fokus pada analisis kebijakan agraria, studi kasus di berbagai wilayah pedesaan, serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah dalam penyelesaian masalah agraria di wilayah pedesaan Indonesia. Melalui analisis kebijakan agraria yang telah diimplementasikan, studi kasus dari beberapa daerah pedesaan, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah, sebagai upaya untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Dalam konteks penelitian ini, rumusan masalah yang akan dijawab adalah: (1) Bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian masalah agraria di wilayah pedesaan? (2) Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan agraria di wilayah pedesaan? (3) Bagaimana partisipasi masyarakat mempengaruhi efektivitas kebijakan agraria yang diterapkan oleh pemerintah? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan agraria yang lebih baik dan lebih adil di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan akademis, tetapi juga dapat menjadi acuan praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperbaiki dan memperkuat sistem agraria di Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode review literatur untuk mengeksplorasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah agraria di wilayah pedesaan Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menilai, dan mensintesis temuan dari berbagai studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan agraria, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, dan peran partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah. Literatur yang digunakan mencakup artikel jurnal akademik, laporan kebijakan pemerintah, buku, dan publikasi lain yang berkaitan dengan hukum agraria dan konflik tanah di Indonesia.

Proses review literatur dimulai dengan mengidentifikasi kata kunci utama seperti "hukum agraria," "peran pemerintah," "sengketa tanah," "kebijakan agraria," dan "partisipasi masyarakat." Kata kunci ini digunakan untuk mencari literatur yang relevan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect, serta situs web resmi pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang terkait dengan isu agraria. Setiap literatur yang ditemukan kemudian dievaluasi berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian, metodologi yang digunakan, dan kualitas data yang disajikan. Hanya literatur yang memenuhi kriteria ini yang dimasukkan dalam analisis lebih lanjut untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari literatur tersebut. Analisis tematik dilakukan dengan cara mengelompokkan temuan-temuan dari literatur ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya, seperti peran pemerintah, tantangan dalam implementasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Setiap kategori dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi hubungan antar tema dan untuk menyusun narasi yang koheren mengenai peran pemerintah dalam penyelesaian masalah agraria di wilayah pedesaan. Hasil analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk diskusi yang komprehensif dan kritis dalam bagian hasil dan pembahasan, yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang topik yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Agraria di Wilayah Pedesaan

Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam penyelesaian masalah agraria di wilayah pedesaan melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu inisiatif utama yang telah diambil adalah Reforma Agraria, yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara lebih adil dan mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Program ini mencakup berbagai upaya, seperti redistribusi tanah, sertifikasi tanah, dan pengembangan infrastruktur pedesaan untuk mendukung produktivitas pertanian. Meskipun demikian, efektivitas Reforma Agraria sering kali terhambat oleh masalah implementasi yang kompleks. (Qatrunnada dkk., 2023)

Salah satu peran penting pemerintah adalah dalam penyusunan dan penegakan regulasi terkait kepemilikan dan penggunaan tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 merupakan landasan hukum utama yang mengatur masalah agraria di Indonesia. Pemerintah

melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertugas untuk memastikan bahwa aturan-aturan ini diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi di lapangan, yang sering kali disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Selain regulasi, pemerintah juga berperan dalam mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah. Di berbagai wilayah pedesaan, pemerintah daerah seringkali berfungsi sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, efektivitas mediasi ini sangat bergantung pada kapasitas dan integritas pejabat pemerintah yang terlibat. Dalam beberapa kasus, intervensi pemerintah telah berhasil menyelesaikan konflik secara damai dan adil, namun dalam kasus lain, mediasi gagal karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau karena adanya kepentingan politik dan ekonomi yang kuat dari pihak-pihak tertentu. (Nabilla dkk., 2022)

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya program sertifikasi tanah yang dilakukan oleh pemerintah. Sertifikasi tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang dapat mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kredit perbankan. Program sertifikasi tanah massal, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), telah diluncurkan untuk mempercepat proses ini. Namun, dalam praktiknya, program ini menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, korupsi, dan resistensi dari masyarakat lokal yang merasa terancam kehilangan tanah mereka.

Dalam hal pengembangan kebijakan, pemerintah juga telah berupaya untuk memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dengan masalah agraria. Pembentukan Tim Nasional Percepatan Reforma Agraria (TNRA) adalah salah satu langkah penting dalam upaya ini. TNRA bertugas untuk mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan reforma agraria, serta untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bekerja sama secara efektif. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antar lembaga masih sering terhambat oleh perbedaan kepentingan dan prioritas, serta oleh masalah komunikasi yang kurang efisien.

Selain itu, peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait masalah agraria juga sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan tanah, seperti jual beli, penyewaan, dan pengalihan hak, dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam banyak kasus, penegakan hukum agraria masih lemah, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik-praktik ilegal, seperti perampasan tanah dan manipulasi dokumen. (Yudanto dkk., 2023)

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah sangat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan agraria yang diterapkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Namun, partisipasi masyarakat masih sering diabaikan atau dianggap sebagai formalitas belaka, tanpa ada upaya yang serius untuk melibatkan mereka secara aktif dalam proses tersebut.

Dalam beberapa kasus, inisiatif partisipatif yang melibatkan masyarakat telah berhasil menyelesaikan sengketa tanah dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan. Misalnya, program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) yang diterapkan di beberapa daerah telah menunjukkan hasil yang positif, dengan masyarakat lokal diberikan peran yang lebih besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi konflik agraria, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konservasi lingkungan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak agraria mereka adalah elemen kunci dalam penyelesaian masalah agraria. Pemerintah perlu berperan aktif dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang regulasi agraria, prosedur hukum, dan cara-cara untuk melindungi hak-hak mereka. Program pendidikan dan penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti workshop, seminar, dan kampanye media, yang dirancang untuk

menjangkau masyarakat pedesaan yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap informasi. (Sihite dkk., 2023)

Peran pemerintah juga terlihat dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor agraria. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas masalah agraria adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan agraria. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil dapat memperkuat upaya-upaya ini, dengan memanfaatkan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh berbagai pihak.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah dalam penyelesaian masalah agraria di wilayah pedesaan sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum dan administratif, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Upaya untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat penegakan hukum harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan masalah agraria di wilayah pedesaan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan, sehingga mendukung tercapainya keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif di Indonesia.

2. Tantangan yang Dihadapi Pemerintah dalam Mengimplementasikan Kebijakan Agraria di Wilayah Pedesaan

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan agraria di wilayah pedesaan. Salah satu tantangan utama adalah birokrasi yang kompleks dan tidak efisien. Struktur birokrasi yang berlapis-lapis sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. (Qatrunnada dkk., 2023)

Korupsi merupakan tantangan signifikan lainnya yang menghambat implementasi kebijakan agraria. Praktik korupsi terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pengurusan sertifikat tanah hingga pengawasan penggunaan lahan. Korupsi tidak hanya memperlambat proses administratif tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Misalnya, dalam beberapa kasus, pejabat pemerintah yang korup dapat memanipulasi dokumen tanah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang akhirnya merugikan masyarakat yang lebih luas.

Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan kebijakan agraria. Dalam banyak kasus, tanggung jawab dan kewenangan terkait masalah agraria tersebar di berbagai instansi, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Ketidakepakatan dan kurangnya komunikasi antar lembaga ini sering kali menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi dalam implementasi program-program agraria.

Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas, juga merupakan tantangan yang signifikan. Banyak daerah pedesaan yang kekurangan staf yang terlatih dan kompeten untuk menangani masalah agraria. Hal ini mengakibatkan penundaan dalam proses sertifikasi tanah, mediasi sengketa, dan pelaksanaan program reforma agraria lainnya. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pejabat agraria memperburuk situasi ini, karena banyak dari mereka tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani isu-isu agraria yang kompleks. (Azizah Raja, 2019)

Tantangan lainnya adalah resistensi dari masyarakat lokal terhadap kebijakan agraria yang diterapkan oleh pemerintah. Banyak masyarakat pedesaan yang merasa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal mereka. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan agraria sering kali menyebabkan ketidakpuasan dan perlawanan dari masyarakat. Selain itu, dalam beberapa kasus, masyarakat merasa terancam oleh program-program pemerintah yang mereka anggap dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan hak atas tanah mereka.

Masalah teknis dan logistik juga sering menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan agraria di wilayah pedesaan. Daerah-daerah terpencil sering kali sulit dijangkau oleh petugas pemerintah karena infrastruktur yang buruk dan kondisi geografis yang menantang. (Razak dkk., 2020) Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan distribusi sertifikat tanah. Selain itu, kurangnya akses masyarakat pedesaan terhadap teknologi dan informasi juga memperburuk situasi, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak-hak agraria mereka dan prosedur yang harus diikuti.

Dalam konteks politik, perubahan kebijakan dan pergantian kepemimpinan sering kali mempengaruhi keberlanjutan program-program agraria. Setiap kali terjadi pergantian pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, kebijakan agraria yang sedang berjalan dapat berubah atau bahkan dihentikan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan, yang pada akhirnya menghambat proses reforma agraria. Selain itu, adanya kepentingan politik dan ekonomi dari berbagai pihak yang kuat sering kali mempengaruhi kebijakan agraria, yang pada akhirnya tidak berpihak pada kepentingan masyarakat pedesaan. (Amaliyah dkk., 2021)

Penelitian ini juga menemukan bahwa aspek hukum dan peraturan yang tumpang tindih menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan agraria. Hukum agraria yang ada sering kali bertentangan dengan hukum lainnya, seperti hukum kehutanan dan hukum lingkungan, yang menyebabkan kebingungan dan konflik dalam penerapannya. Selain itu, kurangnya harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah juga memperburuk situasi ini, karena banyak kebijakan yang tidak sinkron dan saling bertentangan.

Terakhir, kurangnya dukungan finansial menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan agraria. Banyak program agraria yang membutuhkan dana besar untuk pelaksanaan, seperti pengadaan alat ukur tanah, pelatihan petugas, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Namun, anggaran yang disediakan sering kali tidak mencukupi, sehingga banyak program yang tidak dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, proses pengalokasian dana yang birokratis dan lambat juga menghambat pelaksanaan program agraria di lapangan. (Qatrunnada dkk., 2023)

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan agraria di wilayah pedesaan sangat kompleks dan beragam. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi birokrasi, memberantas korupsi, memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proses kebijakan agraria. Hanya dengan demikian, reformasi agraria yang adil dan berkelanjutan dapat terwujud di Indonesia.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Kebijakan Agraria yang Diterapkan oleh Pemerintah

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan kebijakan agraria di wilayah pedesaan. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan agraria sangat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Masyarakat yang merasa dilibatkan dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan cenderung lebih mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan agraria. Sebaliknya, kebijakan yang diterapkan tanpa konsultasi dan partisipasi masyarakat sering kali menghadapi resistensi dan ketidakpuasan. (Sihite dkk., 2023)

Salah satu contoh sukses dari partisipasi masyarakat adalah program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Dalam program ini, masyarakat lokal diberikan peran aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Partisipasi ini tidak hanya membantu mengurangi konflik agraria tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konservasi lingkungan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka, yang kemudian diakomodasi dalam kebijakan pengelolaan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan agraria dengan menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Partisipasi masyarakat juga penting dalam proses sertifikasi tanah. Program sertifikasi tanah massal, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan mencerminkan realitas di lapangan. Masyarakat yang terlibat dalam proses ini cenderung lebih memahami dan menerima hasil sertifikasi, sehingga mengurangi potensi sengketa tanah di kemudian hari. Penelitian ini menemukan bahwa daerah-daerah yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam program PTSL menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepastian hukum kepemilikan tanah dan akses masyarakat terhadap kredit perbankan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan agraria. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat juga dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan agraria berhasil mengungkap praktik-praktik korupsi dan penyimpangan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah. (Sihite dkk., 2023)

Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah. Dalam banyak kasus, sengketa tanah dapat diselesaikan secara lebih efektif dan damai melalui mediasi yang melibatkan masyarakat. Mediasi ini memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan mereka, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Contoh sukses dari pendekatan ini dapat dilihat di beberapa daerah di Jawa Tengah, di mana mediasi yang melibatkan masyarakat berhasil menyelesaikan berbagai sengketa tanah yang kompleks dan berkepanjangan.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan agraria masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak agraria mereka. Banyak masyarakat pedesaan yang tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai regulasi agraria dan prosedur hukum yang harus diikuti. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menipu atau memanipulasi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak agraria mereka sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan perlindungan hak-hak mereka.

Selain itu, kurangnya kapasitas dan sumber daya masyarakat juga menjadi hambatan dalam partisipasi mereka. Banyak masyarakat pedesaan yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk terlibat aktif dalam proses kebijakan agraria, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang memadai, seperti pelatihan dan bantuan teknis, untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam kebijakan agraria. Dalam beberapa kasus, inisiatif dari organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil telah berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Melalui partisipasi aktif, masyarakat merasa lebih dihargai dan didengar oleh pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah. Kepercayaan ini sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dari kebijakan agraria, karena masyarakat yang percaya pada pemerintah cenderung lebih mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat tidak selalu mudah diimplementasikan. Dalam beberapa kasus, partisipasi masyarakat menghadapi resistensi dari pihak-pihak tertentu, seperti elite lokal atau pejabat pemerintah yang merasa terganggu oleh keterlibatan masyarakat. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan dan pandangan di antara anggota masyarakat itu sendiri juga dapat menjadi hambatan dalam partisipasi yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi yang inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua suara masyarakat dapat didengar dan diakomodasi dalam proses kebijakan agraria.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat perlu dipandang sebagai proses yang berkelanjutan dan tidak hanya sebagai formalitas belaka. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara terus-menerus dalam setiap tahap proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Selain itu, perlu ada upaya yang serius untuk mengintegrasikan pandangan dan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan yang diambil. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan agraria tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di kalangan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam efektivitas kebijakan agraria yang diterapkan oleh pemerintah. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses kebijakan cenderung lebih mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan agraria. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mendorong dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses kebijakan agraria, dengan memberikan dukungan yang memadai dan menciptakan mekanisme partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. (Verawati dkk., 2020)

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penyelesaian masalah agraria di wilayah pedesaan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan agraria dapat diatasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan agraria. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya merupakan hak tetapi juga merupakan elemen penting dalam menciptakan kebijakan agraria yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penyelesaian masalah agraria di wilayah pedesaan Indonesia sangat signifikan, namun dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Efektivitas kebijakan agraria yang diterapkan pemerintah dipengaruhi oleh birokrasi yang tidak efisien, praktik korupsi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta resistensi dari masyarakat lokal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih holistik dan terkoordinasi, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan agraria terbukti mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Masyarakat yang terlibat aktif dalam setiap tahap kebijakan cenderung lebih mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan kebijakan agraria. Pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak agraria, dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat, serta penciptaan mekanisme partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk memastikan keberhasilan kebijakan agraria. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan memberdayakan masyarakat, pemerintah dapat menciptakan kebijakan agraria yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif di Indonesia.

E. Referensi

- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma agraria dan penanganan sengketa tanah. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>
- Aswim, D., Kasim, A. M., & Florita, M. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah Di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 9. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.7144>

- Azizah Raja, N. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 53–66.
- Nabilla, C., Kariem, M. Q., & Febrianti, D. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 100. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2462>
- Qatrunnada, A., Bakri, Herdawati, Syarifudin, M., Adnan, I. M., & Syaputra, D. (2023). Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Landreform di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 1–12. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.527>
- Razak, M. A., Patittingi, F., & Maskun, M. (2020). Pemetaan Sertipikat Secara Digital (Plotting) dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *PETITUM*, 8(2), 143–156. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.818>
- Sihite, G. M., Malik, I., Sumertha KY, I. G., & Widodo, P. (2023). Peran organisasi masyarakat sipil/civil society organization (cso) dalam menyelesaikan konflik agraria di indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5232–5244. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i11.2023>
- Verawati, R., Salshadilla, V. R. W., & Al-Fatih, S. (2020). Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(2), 1109–1121.
- Yudanto, D., Faried, F. S., & -, S. (2023). Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Penyelesaian Dalam Sengketa Pertanahan Di Kawasan Pedesaan Dalam Mewujudkan Goodwil. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), 191–200. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4200>